

Meningkatkan Profesionalisme Guru Dalam Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Melalui Kegiatan Workshop di MTs Al-Ma'arif Rancalutung Pabuaran Serang

Sahruli

Kepala MTs Al-Ma'arif Rancalutung

Abstract. *This School Action Research was carried out on the basis of field facts that the author found that there were still many madrasah teachers who were still unable and proficient in setting the Minimum Completeness Criteria (KKM) required in the implementation of the Madrasah Curriculum at MTs Al-Ma'arif Rancalutung. This condition can be seen as a finding when carrying out a teacher's duties, especially in carrying out learning evaluations, both end of semester exams and madrasa exams. The expected goal of this school action research is that teachers at MTs Al-Ma'arif Rancalutung can establish Minimum Completeness Criteria and this workshop can improve the ability of madrasa teachers in preparing KKM. This school action research was conducted at MTs Al-Ma'arif Rancalutung with a total of 15 subject teachers, while the implementation of this action research consisted of two cycles. The results of this study indicate an increase in the ability of teachers when setting Minimum Completeness Criteria and this workshop is effective as an approach used to increase teachers' abilities in setting minimum completeness criteria because teachers are more active and a growing sense of responsibility for setting minimum completeness criteria in each subject that taught.*

Keywords: *Improving ability, minimum mastery criteria, workshop*

Abstrak. Penelitian Tindakan Sekolah ini dilaksanakan atas dasar fakta-fakta lapangan yang ditemukan penulis bahwa masih banyak sekali ditemukan guru-guru madrasah yang masih kurang mampu dan cakap dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang dituntut dalam implementasi Kurikulum Madrasah di MTs Al-Ma'arif Rancalutung. Kondisi ini dapat dilihat sebagai temuan pada saat pelaksanaan tugas seorang guru khususnya dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran, baik ujian akhir semester maupun ujian madrasah. Adapun tujuan yang diharapkan penelitian tindakan sekolah ini adalah agar guru-guru pada MTs Al-Ma'arif Rancalutung dapat menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal dan workshop ini dapat meningkatkan kemampuan guru madrasah dalam penyusunan KKM. Penelitian tindakan sekolah ini dilakukan di MTs Al-Ma'arif Rancalutung dengan jumlah guru mata pelajaran sebanyak 15 guru, sedangkan pelaksanaan penelitian tindakan ini terdiri dari dua siklus. Hasil Penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan dalam kemampuan guru ketika menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal dan workshop ini efektif sebagai pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menetapkan kriteria ketuntasan minimal karena guru semakin aktif dan tumbuhnya rasa tanggung jawab untuk menetapkan kriteria ketuntasan minimal pada setiap mata pelajaran yang diajarkan.

Kata Kunci: Meningkatkan kemampuan, kriteria ketuntasan minimal, workshop.

LATAR BELAKANG

Kebijakan pemerintah pada bidang pendidikan telah diatur dengan ditetapkannya Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana diketahui bahwa Peraturan tersebut telah diubah dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Standar Nasional Pendidikan merupakan kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cakupan SNP tersebut terdiri dari 8 (delapan) standar pendidikan, yaitu: standar kompetensi lulusan; standar isi; standar proses; standar penilaian pendidikan; standar tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; dan standar pembiayaan.

Dalam standar penilaian pada KTSP di antaranya setiap sekolah atau madrasah dalam hal ini guru setiap awal semester tahun pelajaran lebih dahulu menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) namun pada pelaksanaan kegiatan supervisi di MTs Al-Ma'arif Rancalutung mendapatkan temuan permasalahan yakni ada di antara guru-guru tersebut belum dan bahkan ada yang tidak mampu menetapkan KKM mata pelajaran yang diampunya. Saat ini kepala sekolah dituntut untuk memiliki kompetensi penelitian pengembangan, tidak hanya sekedar penerima pembaharuan dari hasil penelitian para peneliti dari kalangan perguruan tinggi, melainkan kepala sekolah ikut bertanggung jawab dan berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya sendiri melalui penelitian tindakan sekolah yang berkaitan dengan tugas pokok kepala sekolah yaitu monitoring, menilai, membina dan melaporkan serta menindaklanjuti hasil supervisi. Berdasarkan hasil temuan sesuai dengan tugas pokok kepala madrasah maka peneliti berupaya meningkatkan profesionalisme guru dalam menetapkan KKM melalui kegiatan workshop. Dari hasil supervisi kepala sekolah, faktor penyebab ketidakmampuan guru dalam menetapkan KKM adalah sebagai berikut : (1) Guru belum mendapatkan pengetahuan mendalam tentang bagaimana menetapkan KKM, (2) Untuk menetapkan KKM selama ini guru hanya dengan modal perkiraan tanpa perhitungan secara rinci, (3) Guru mengadopsi KKM yang ditetapkan sekolah lain yang kemudian ditetapkan di madrasah tempat tugasnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka judul penelitian Tindakan sekolah ini adalah: "Meningkatkan Profesionalisme Guru Dalam Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Melalui Kegiatan Workshop di MTs Al-Ma'arif Rancalutung Pabuaran Serang.

HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang diajukan dan didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jawaban sementara ini selanjutnya akan diuji dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Oleh karenanya, hipotesis penelitian ini adalah : “jika kegiatan workshop dilaksanakan dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal maka akan terjadi peningkatan kemampuan guru MTs Al-Ma’arif Rancalutung dalam menetapkan kriteria ketuntasan belajar.”

KAJIAN TEORITIS

Definisi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah kriteria paling rendah yang menyatakan bahwa peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar. KKM disebut pula dengan batas lulus atau juga sebagai ukuran atau patokan yang disepakati. Adapun penetapan KKM ini dilakukan pada awal tahun pembelajaran berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran pada satuan pendidikannya atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik hampir sama. Pertimbangan guru secara akademis menjadi pertimbangan utama dalam penetapan KKM. Kriteria ketuntasan belajar setiap indikator yang ditetapkan dalam sebuah kompetensi dinyatakan dengan angka dari rentang 0-100. Dengan demikian, nilai KKM dinyatakan dengan angka 0-100. Angka maksimal 100 merupakan kriteria ketuntasan ideal. Target ketuntasan belajar secara nasional diharapkan mencapai minimal 75. Satuan pendidikan dapat memulai dari kriteria ketuntasan minimal di bawah target nasional, kemudian ditingkatkan secara bertahap secara terus menerus sampai mendekati angka ideal. KKM menjadi acuan bersama antara guru, peserta didik, dan orang tua/wali, sehingga nilai KKM harus dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar Peserta Didik.

Adapun fungsi KKM sebagai berikut:

1. Pedoman guru dalam mengevaluasi kompetensi peserta didik sesuai KD mata pelajaran yang diikuti. Setiap Kompetensi Dasar (KD) dapat diketahui ketercapaiannya berdasarkan KKM yang ditetapkan.
2. Pedoman peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti ujian setiap mata pelajaran. Setiap Kompetensi Dasar dan Indikator yang ditetapkan dalam KKM harus dicapai dan dikuasai peserta didik. Dengan demikian, peserta didik dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti penilaian, agar mencapai nilai KKM. Jika tidak tercapai, maka peserta didik harus mengetahui Kompetensi Dasar yang belum tuntas dan memerlukan perbaikan.

3. Bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran sekolah. Evaluasi keterlaksanaan program pembelajaran sekolah dan juga hasil program kurikulum dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian KKM. Hasil pencapaian Kompetensi Dasar berdasarkan KKM yang telah ditetapkan perlu dianalisis untuk selanjutnya dipetakan kompetensi yang mudah atau sulit. Selain itu, hasil pencapaian KKM juga digunakan untuk menentukan cara perbaikan proses pembelajaran dan pemenuhan sarana prasarana belajar di sekolah.
4. Kontrak pedagogik antara guru dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Keberhasilan pencapaian KKM adalah upaya yang harus dilakukan bersama antara guru, peserta didik, kepala sekolah, dan orangtua. Guru melakukan upaya pencapaian KKM dengan memaksimalkan proses pembelajaran dan juga penilaian. Peserta didik mengupayakan pencapaian KKM dengan cara proaktif mengikuti kegiatan pembelajaran dan mengerjakan seluruh tugas yang didesain guru. Orangtua dapat membantu memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Kepala sekolah berupaya memaksimalkan pemenuhan sarana belajar di sekolah.
5. Target satuan pendidikan dalam mencapai kompetensi tiap mata pelajaran. Satuan pendidikan harus berupaya maksimal untuk dapat melampaui KKM yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian KKM menjadi tolok ukur kinerja satuan pendidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan. Satuan pendidikan dengan KKM yang tinggi dan mampu melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dapat menjadi indikator kualitas mutu pendidikan bagi masyarakat.

Selain KKM memiliki fungsi yang beragam, KKM juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Penetapan KKM adalah kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan secara kualitatif (kemampuan akademis peserta didik) dan kuantitatif (kesepakatan rentang angka).
2. KKM setiap Kompetensi Dasar (KD) merupakan rerata dari indikator pada KD tersebut.
3. KKM mata pelajaran merupakan rerata semua KKM KD dalam satu semester dan dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar peserta didik.
4. Indikator adalah acuan pembuatan instrumen penilaian, sehingga setiap indikator memerlukan perbedaan nilai KKM.

Dalam menetapkan KKM, satuan Pendidikan dapat memilih model KKM yang diinginkan.

1. Lebih dari satu KKM. Satuan pendidikan dapat memilih setiap mata pelajaran yang memiliki KKM berbeda. Misalnya. KKM IPA (72), Matematika (70), Bahasa Indonesia (74), dan seterusnya. KKM juga dapat ditentukan berdasarkan rumpun mata pelajarannya. Contohnya, rumpun MIPA (Matematika dan IPA) memiliki KKM 73, rumpun bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) memiliki KKM 75, dan rumpun IPS (IPS dan PPKn) memiliki KKM 78.
2. Satu KKM. Satuan pendidikan dapat memilih satu KKM untuk semua mata pelajaran. Setelah KKM tiap mata pelajaran ditentukan, maka KKM satuan pendidikan dapat ditetapkan dengan memilih KKM yang terendah, rerata, atau modus dari seluruh KKM mata pelajaran.

KKM dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek: karakteristik peserta didik (*intake*), karakteristik mata pelajaran (kompleksitas materi atau kompetensi), dan kondisi satuan pendidikan (daya dukung) pada proses pencapaian kompetensi.

1. Karakteristik Peserta Didik (*Intake*). Karakteristik peserta didik (*intake*) diketahui dengan memperhatikan kualitas peserta didik yang dapat diidentifikasi dari hasil tes awal, nilai rapor, atau hasil ujian jenjang sebelumnya. Karakteristik peserta didik bagi peserta didik baru kelas 1 SD dapat diketahui dari hasil tes awal yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Karakteristik peserta didik baru kelas VII SMP dapat dilihat dari rerata nilai rapor SD, nilai Ujian Sekolah SD, dan hasil seleksi masuk peserta didik baru di jenjang SMP.
2. Karakteristik Mata Pelajaran (Kompleksitas). Karakteristik Mata Pelajaran (kompleksitas) adalah tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran. Kompleksitas mata pelajaran dapat ditetapkan antara lain melalui *expert judgment* guru mata pelajaran melalui forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat sekolah. Penetapan tingkat kompleksitas mata pelajaran adalah dengan memperhatikan hasil analisis jumlah KD, kedalaman KD, keluasan KD, dan perlu tidaknya pengetahuan prasyarat.
3. Kondisi Satuan Pendidikan (Daya Dukung). Kondisi satuan pendidikan atau daya dukung, antara lain meliputi :
 - kompetensi pendidik;
 - jumlah peserta didik dalam satu kelas;
 - predikat akreditasi sekolah; dan

- keyalakan sarana prasarana sekolah.

Untuk memulai Perumusan KKM, seorang guru mata pelajaran harus mengawalinya dengan Langkah-langkah berikut ini:

1. Menghitung jumlah Kompetensi Dasar setiap mata pelajaran pada masing-masing jenjang dalam satu tahun pelajaran.
2. Menentukan nilai aspek karakteristik peserta didik (*intake*), karakteristik mata pelajaran (kompleksitas), dan kondisi satuan pendidikan (daya dukung), sehingga menjadi KKM KD pengetahuan dan keterampilan.
3. Untuk memudahkan analisis setiap KD, perlu dibuat skala penilaian yang disepakati oleh guru mata pelajaran, seperti contoh berikut.
4. Menentukan KKM KD dasar untuk mendapatkan KKM mata pelajaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Al-Ma'arif Rancalutung Pabuaran Serang. Madrasah ini menampung siswa sebanyak 141 orang. Sedangkan jumlah guru mata pelajaran sebanyak 15 orang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tindakan yang terdiri dari dua siklus. Langkah-langkah setiap siklus adalah perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan/observasi dan refleksi. Penelitian tindakan sekolah ini dianggap berhasil apabila 85% guru sudah dapat menetapkan KKM.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan workshop pada siklus 1 yaitu 15 Juli 2022. Untuk menjelaskan cara menetapkan KKM digunakan ceramah yang diselingi dengan tanya jawab multi arah sehingga diharapkan interaksi antara peserta dengan peneliti lebih efektif. Adapun penugasan diberikan untuk mengevaluasi tingkat ketercapaian indikator dari para peserta workshop.

Pelaksanaan workshop pada siklus 2 yaitu tanggal 22 Juli 2022. Metode ceramah pada siklus ini masih dilakukan untuk mengoptimalkan aspek-aspek yang belum mencapai standar. Selain itu kegiatan diskusi kelompok mulai lebih mendominasi kegiatan workshop, dimana peserta dibagi dalam 3 kelompok dan setiap kelompok pesertanya heterogen terdiri dari peserta yang sudah mencapai indikator keberhasilan dan yang belum. Hal ini dimaksudkan agar terjadi transfer dari peserta yang sudah bisa kepada yang belum bisa.

Dari penelitian tindakan siklus 1 diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Kemampuan peserta dalam menentukan KKM belum mencapai standar, yakni hanya 57,75%. Hal ini dapat dilihat secara detail sebagai berikut:
 - a. Kemampuan merumuskan indikator 50%,
 - b. Kemampuan menetapkan kompleksitas 45%,
 - c. Kemampuan menetapkan daya dukung 56%,
 - d. Kemampuan menetapkan intake siswa 55%,
 - e. Kemampuan menetapkan KKM Indikator 58%,
 - f. Kemampuan menetapkan KKM KD 58%,
 - g. Kemampuan menetapkan KKM SK 70%,
 - h. Kemampuan menetapkan KKM MP 70%.
2. Masih ditemukan peserta yang masih kurang aktif, yakni sekitar 20%.

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilaksanakan lagi tindakan pada siklus 2. Pada siklus ke-2 ini, setiap peserta diwajibkan untuk bertanya. Metode diskusi dilakukan untuk meningkatkan tingkat keaktifan peserta. Dari penelitian tindakan siklus 2 diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Kemampuan peserta dalam menentukan KKM sudah mengalami peningkatan yakni 86,87% bahkan melampaui dari 85% yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan bahwa :
 - a) Kemampuan merumuskan indikator 78%.
 - b) Kemampuan menetapkan kompleksitas 85%.
 - c) Kemampuan menetapkan daya dukung 87%
 - d) Kemampuan menetapkan intake siswa 85%.
 - e) Kemampuan menetapkan KKM Indikator 92%.
 - f) Kemampuan menetapkan KKM KD 90%.
 - g) Kemampuan menetapkan KKM SK 88%
 - h) Kemampuan menetapkan KKM MP 90%.
2. Tingkat Keaktifan peserta sudah mencapai 100%.

Pada siklus 2, setelah ditambahkan diskusi kelompok terjadi peningkatan baik kemampuan peserta menetapkan KKM maupun keaktifan mereka bila dibandingkan dengan siklus 1. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut :

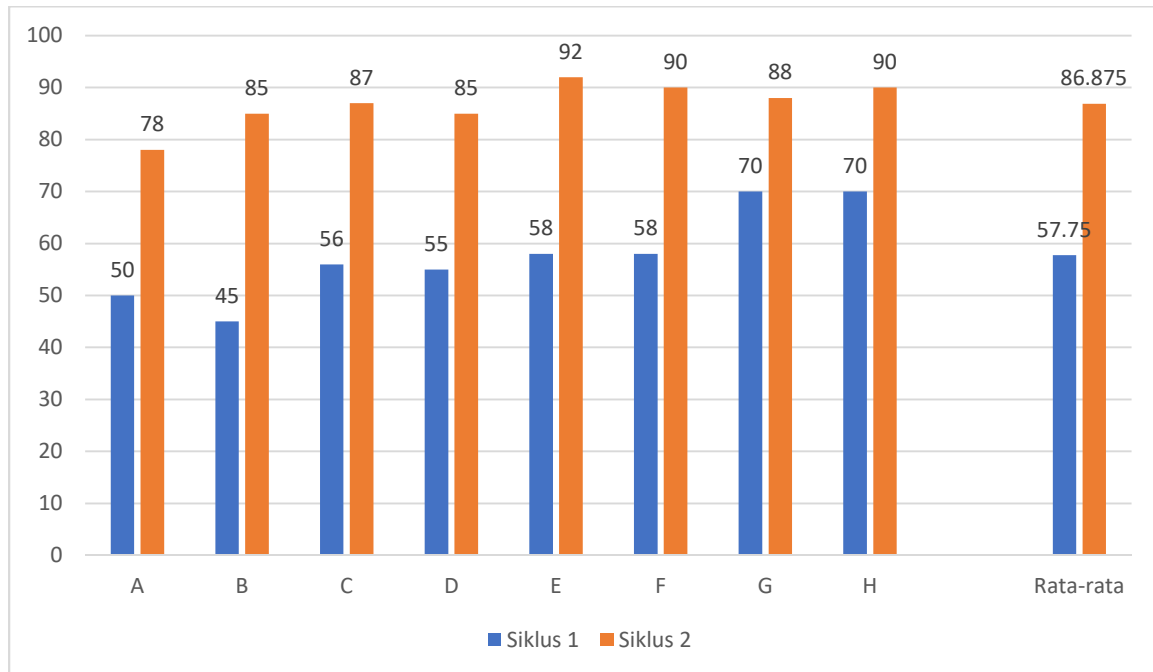
Tabel 1
Perbandingan Hasil yang Sudah Dicapai
Antara Siklus 1 dan Siklus 2

No	Aspek Hasil yang sudah dicapai	Siklus 1 (%)	Siklus 2 (%)
1	Kemampuan merumuskan indikator	50	78
2	Kemampuan menetapkan kompleksitas	45	85
3	Kemampuan menetapkan daya dukung	56	87
4	Kemampuan menetapkan intake siswa	55	85
5	Kemampuan menetapkan KKM Indikator	58	92
6	Kemampuan menetapkan KKM KD	58	90
7	Kemampuan menetapkan KKM SK	70	88
8	Kemampuan menetapkan KKM MP	70	90
Jumlah		462	695
Rata-rata		57,75	86,87

Pada siklus 1 aspek KKM yang sudah memenuhi/mencapai standar adalah Kemampuan merumuskan indikator 50%, Kemampuan menetapkan kompleksitas 45%, Kemampuan menetapkan daya dukung 56%, Kemampuan menetapkan intake siswa 55%, Kemampuan menetapkan KKM Indikator 58%, Kemampuan menetapkan KKM KD 58%, Kemampuan menetapkan KKM SK 70%, Kemampuan menetapkan KKM MP 70%. Sedangkan pada siklus 2 aspek KKM yang sudah memenuhi standar adalah Kemampuan merumuskan indikator 78%, Kemampuan menetapkan kompleksitas 85%, Kemampuan menetapkan daya dukung 87%, Kemampuan menetapkan intake siswa 85%, Kemampuan menetapkan KKM Indikator 92%, Kemampuan menetapkan KKM KD 90%, Kemampuan menetapkan KKM SK 88%, Kemampuan menetapkan KKM MP 90%. Perbandingan setiap aspek KKM pada siklus 1 dan 2 dapat dilihat pada grafik 1.

Dengan demikian perbandingan hasil kegiatan workshop dalam meningkatkan kemampuan peserta dalam penyusunan kriteria ketuntasan minimal antara siklus 1 dan siklus 2 terdapat peningkatan sebanyak 29,12% atau dari 57,75% pada siklus 1 hasilnya naik menjadi 86,87% pada siklus 2.

Grafik 1
Perbandingan Tiap Aspek KKM yang sudah memenuhi standar
antara siklus 1 dan 2



Keterangan:

A = Kemampuan Merumuskan Indikator.

B = Kemampuan Menentukan Indikator.

C = Kemampuan Menentukan Daya Dukung .

D = Kemampuan Menentukan Intake Sisiwa.

E = Kemampuan Menentukan KKM Indikator.

F = Kemampuan Menentukan KKM KD.

G = Kemampuan Menentukan KKM SK.

H = Kemampuan Menentukan KKM Mata Pelajaran.

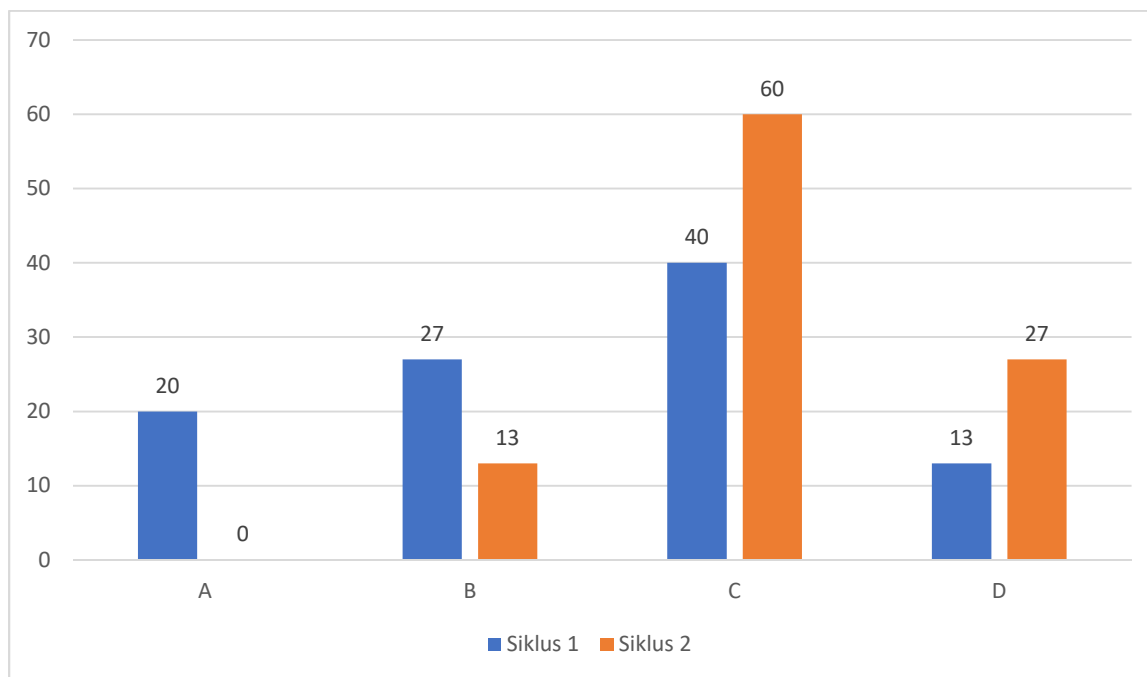
Sedangkan rata-rata setiap aspek KKM yang sudah memenuhi standar pada siklus 1 (57,75%) dan pada siklus 2 (86,87%).

Tabel 2
Perbandingan Tingkat Keaktifan Peserta Siklus 1 dan Siklus 2

No	Kriteria	Siklus 1		Siklus 2	
		Jml Peserta	%	Jml Peserta	%
1	Kurang aktif	3	20	0	0
2	Cukup aktif	4	27	2	13
3	Aktif	6	40	9	60
4	Sangat aktif	2	13	4	27
Jumlah		15	100	15	100

Dari table di atas, diketahui bahwa kegiatan workshop pada siklus 1 masih ditemukan peserta yang kurang aktif yakni 20%, cukup aktif 27%, aktif 40%, dan sangat aktif 13%. Sedangkan pada siklus 2 peserta yang cukup aktif 13%, peserta yang aktif 60% dan peserta yang sangat aktif 27%. Dengan demikian pada siklus 1 masih ditemukan 20% peserta yang kurang aktif dan sisanya 80% aktif mengikuti kegiatan workshop. Sedangkan pada siklus 2 sudah tidak ada lagi peserta yang kurang aktif (0%), dan keaktifan peserta mengalami peningkatan 20%, yakni dari 80% ke 100% peserta aktif. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2
Perbandingan Tingkat Keaktifan Peserta Siklus 1 dan Siklus 2



Keterangan:

A : Kurang aktif

B : cukup aktif

C : aktif

D : sangat aktif

PENUTUP

Kesimpulan dari hasil penelitian tindakan sekolah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Workshop dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menetapkan KKM di MTs Al-Ma'arif Rancalutung Pabuaran Serang
- 2) Workshop dapat meningkat keaktifan dan tanggung jawab peserta dalam menetapkan KKM.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, disarankan kepada kepala sekolah MTs Al-Ma'arif Rancalutung Pabuaran Serang untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menetapkan KKM bisa menggunakan workshop. Workshop sebaiknya dilakukan pada awal semester tahun ajaran baru untuk menetapkan KKM. Selain untuk menetapkan KKM, workshop juga dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standar Nasional Pendidikan (2006) Naskah Akademik Tentang Standar Kepala sekolah Satuan Pendidikan, Direktorat Pendidikan, Jakarta.
- Depdiknas (2008) Pedoman Penelitian Tindakan Sekolah Peningkatan Kompetensi Supervisi Kepala sekolah SD/SMP, Dirjen PMPTK, Jakarta.
- (2013), Panduan Teknis Penyusunan Rencan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di Sekolah Menengah, Jakarta.
- (2013), Permendikbud No. 81 A tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, Jakarta.
- (2013), Permendikbud No. 65 tahun 2013 tentang Standar Proses, Jakarta.
- Fathurrohman Pupuh & Sutikno Sobry (2007) Strategi Belajar Mengajar, Bandung PT Rafika Aditama.
- <https://www.google.com/search> Surakarta 2 Nopember 2013 Kegiatan IHT
- Ibrohim (2011) Makalah Program Induksi Guru Pemula, FMIPA Universitas Malang
- Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjamin Mutu Pendidikan Kementerian Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013), Bahan Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013, Yogyakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah (2013) Panduan Teknis Pembelajaran Pendekatan Saintifik di Sekolah Menengah, Jakarta.
- Nur, M. 2011. Pembelajaran Berdasarkan Masalah. Surabaya: PSMS Unesa.
- Nur, M. & Wikandari, P.R. 2000. Pengajaran Berpusat Kepada Siswa Dan Pendekatan Konstruktivis Dalam Pengajaran. Surabaya : Universitas Negeri Surabaya University Press.
- Surono (2007) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Tengah, Semarang
- Tim Sertifikasi Unesa. 2010. Modul Pembelajaran Inovatif. Surabaya: PLPG Unesa
- Sugiyono.2019.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta Bandung.
- Halian, Aan Baidillah. (2011). KKM: Antara Standarisasi dan Gengsi. <http://udugudug.wordpress.com/2011/04/10/kkm-antara-standarisasi-dan-gengsi>.